

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PPN DAN PPnBM

Emi Masyitah

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Potensi Utama
emi.masyitah@gmail.com

ABSTRAK

PPN dan PPnBM merupakan pajak atas konsumsi, pajak ini sangat bergantung terhadap kondisi perekonomian secara umum. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh jumlah PKP, PDB, Ekspor, Impor, Inflasi, Konsumsi, Suku Bunga serta Jumlah Penduduk terhadap penerimaan PPN dan PPnBM di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan asosiatif. Sumber data penelitian adalah data sekunder berupa data berkala berjumlah 30 pengamatan dalam kurun waktu tahun 1987-2016. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda menggunakan metode kuadrat linierterkecil (OLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial beberapa variable berpengaruh signifikan terhadap PPN dan PPnBM, tetapi variabel Jumlah PKP, Inflasi, Konsumsi dan Suku Bunga tidak berengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN dan PPnBM. Dan seluruh variable secara bersama-sama mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan PPN dan PPnBM.

Kata kunci: PPN dan PPnBM

ABSTRACT

PPN and PPnBM is a tax on consumption, PPN and PPnBM are highly dependent on general economic conditions. This study aims to examine the effect of Total of Taxable Enterprise, GDP, Exports, Imports, Inflation, Consumption, Interest Rates and Population to PPN and Sales PPnBM revenue in Indonesia. The research is associative approach. The Data source is time series totaly 30 observations in the period of 1987-2016. Data analysis technique is used multiple linear regression with Ordinary Least Square (OLS). The results showed that Partially, the some variables had significant influence on PPN and PPnBM, but the Total of Taxable Enterprise, Inflation, Consumption and Interest Rate variables didn't have significant influence on the acceptance of PPN and PPnBM. And the variable of all variable together giving significant influence to the acceptance of PPN and PPnBM.

Keywords: VAT and Sales Tax on Luxury Goods

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

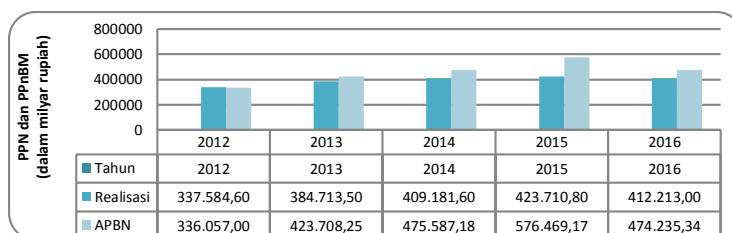
PPN dan PPnBM merupakan salah satu jenis pajak yang ada di Indonesia. Pajak yang bersifat tidak langsung ini dikenakan terhadap konsumsi pada setiap tingkatan produksi atau distribusi. Meskipun pengenaan PPN dan PPnBM dilakukan terhadap nilai tambah yang terjadi dalam setiap tingkatan produksi dan/atau distribusi barang atau jasa, namun beban atas pajak ini secara tidak langsung ditanggung oleh konsumen akhir (Untung Sukardji, 2014).

Pemungutan PPN dan PPnBM di Indonesia didasarkan pada Undang Undang No.8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Barang Mewah, yang

berlaku mulai 1 April 1985. Undang Undang ini telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan pertama dengan Undang Undang No.11 Tahun 1994 berlaku mulai 1 Januari 1995, perubahan kedua dengan Undang Undang No.18 Tahun 2000 berlaku mulai 1 Januari 2001, perubahan ketiga dengan Undang Undang No.42 Tahun 2009 berlaku mulai 1 April 2010.

Pemerintah tiap tahun meningkatkan target penerimaan pajak dalam APBN untuk mengoptimalkan pendapatan negara guna realisasi pembangunan ekonomi. Namun yang menjadi masalah adalah realisasi target penerimaan perpajakan dapat berubah atau tidak mencapai target dari yang telah ditetapkan sebelumnya.

Penerimaan perpajakan dari PPN dan PPnBM selalu mengalami perkembangan yang signifikan semenjak diperkenalkan. Perkembangan penerimaan PPN dan PPnBM di Indonesia dalam kurun waktu tahun 2012-2016 dapat dilihat pada gambar 1 berikut :



Gambar 1. Perkembangan Penerimaan PPN dan PPnBM Tahun 2012-2016

Sumber : Kementerian Keuangan (data diolah)

Berdasarkan gambar 1 di atas, penerimaan PPN dan PPnBM dalam periode 2012-2016 meningkat rata-rata sebesar 5,33% pertahun. Akan tetapi tingkat pertumbuhan PPN dan PPnBM tersebut terus mengalami penurunan di tahun 2013 sebesar 14%, tahun 2014 sebesar 6,4%, tahun 2015 sebesar 3,6% dan kembali menurun sebesar -2,7% pada tahun 2016, sebagai akibat dari menurunnya laju pertumbuhan ekonomi di tahun 2013 sebesar 5,6% menjadi 5,0% pada tahun 2014 dan 4,9 persen pada tahun 2015 sehingga berdampak pada melemahnya konsumsi domestik walaupun pada tahun 2016 naik menjadi 5,0 persen. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi penerimaan PPN dan PPnBM belum mencapai target. Perbedaan target dengan realisasi penerimaan yang belum tercapai merupakan salah satu catatan penting bagi pemerintah untuk mengevaluasi APBN.

PPN dan PPnBM merupakan salah satu pajak yang memberikan sumbangsi besar bagi negara, mengingat besarnya peranan PPN dan PPnBM sebagai sumber penerimaan negara, maka penting adanya kajian-kajian terhadap berbagai faktor yang dapat mempengaruhinya, khususnya terhadap penerimaan PPN dan PPnB M (Wahyudi, dkk (2009).

Subjek PPN dan PPnBM di Indonesia yaitu Pengusaha Kena Pajak (PKP), PKP adalah orang atau badan yang bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia yang dalam hubungan perusahaan atau pekerjaannya menghasilkan dan ada kemungkinan menyerahkan barang kena pajak dan mendistribusikan barang kena pajak di daerah pabean, mengimpor dan mengekspor barang kena pajak atau melakukan usaha jasa kena pajak (Soemitro, 2011, hal. 36).

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, Jumlah PKP di Indonesia dalam kurun waktu tahun 2012-2016 terus meningkat setiap tahunnya. Di Tahun 2012 jumlah PKP di Indonesia sebanyak 781.321, tahun 2013 sebanyak 810.542, tahun 2014 sebanyak 843.968, tahun 2015 sebanyak 871.375, dan sebanyak 880.276 di tahun 2016. Dengan demikian dapat disimpulkan kenaikan jumlah PKP lima tahun terakhir sejalan dengan rata-rata pertumbuhan penerimaan PPN dan PPnBM sebesar 5,33% per tahun.

Selain Jumlah PKP, yang mempengaruhi penerimaan PPN dan PPnBM adalah indikator-indikator ekonomi makro. PDB, ekspor, impor, inflasi, konsumsi, suku bunga serta jumlah penduduk sangat mungkin memiliki pengaruh terhadap penerimaan PPN dan PPnBM.. Fluktuasi ekonomi yang terus menerus berlangsung menyebabkan penurunan daya beli, konsumsi, investasi, ekspor dan impor yang akan berdampak pada penerimaan pajak menurut Renata dan kawan-kawan (2016).

Pertumbuhan ekonomi yang tercermin dari peningkatan PDB akan berpengaruh terhadap penerimaan negara di sektor perpajakan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2017) PDB di Indonesia menunjukkan setiap tahunnya. Pada Tahun 2012 jumlah PDB sebesar Rp.8.615.704,5

milyar, meningkat menjadi sebesar Rp.9.546.134,00 milyar tahun 2013, naik lagi menjadi sebesar Rp.10.569.705,30 milyar tahun 2014, dan naik lagi sebesar Rp.11.540.789,80 milyar tahun 2015, dan terus naik lagi menjadi sebesar Rp. 12.406.808,80 milyar di tahun 2016. Kenaikan nilai PDB setiap tahunnya menunjukkan berkembangnya perekonomian dan meningkatnya pendapatan masyarakat. Dengan meningkatnya pendapatan masyarakat menurut Nurhayati (2003), dapat dikaitkan dengan pertumbuhan tingkat konsumsi yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak atas konsumsi yakni PPN dan PPnBM.

Ekspor adalah variabel penting yang dapat menunjukkan seberapa besar pertumbuhan ekonomi suatu negara. Kegiatan bisnis di sektor riil bias terjaga melalui ekspor, karena produksi barang tidak hanya dilakukan di dalam negeri saja, tetapi juga melalui perdagangan Internasional. Namun, menurut data yang didapat dari Badan Pusat Statistik (2016), perkembangan ekspor Indonesia mulai tahun 2012-2016 terus mengalami penurunan setiap tahunnya dari Rp.2.470.413,99 milyar menjadi Rp.2.373.173,38 milyar pada 2013, tahun 2014 sebesar Rp.2.287.750,88 milyar, tahun 2015 sebesar Rp.1.954.761,79 milyar, dan tahun 2016 sebesar Rp.1.887.420,75 milyar.

Tidak jauh beda dengan perkembangan ekspor, impor di Indonesia mulai tahun 2012-2016 juga mengalami penurunan. Pada Tahun 2012 jumlah impor sebesar Rp. 2.491.983,01 milyar, tahun 2013 sebesar Rp.2.426.172,71 milyar, tahun 2014 sebesar Rp.2.316.324,62 milyar, tahun 2015 sebesar Rp.1.855.032,45 milyar, dan tahun 2016 sebesar Rp. 1.763.486,61 milyar. Berdasarkan data ekspor dan impor tahun 2012-2016 diketahui bahwa impor di Indonesia masih lebih tinggi di dibandingkan ekspornya.

Selain ekspor dan impor, yang dapat mempengaruhi penerimaan PPN dan PPnBM adalah inflasi. Inflasi yang tinggi akan berdampak pada naiknya harga jual dan meningkatnya keuntungan perusahaan, sehingga mendorong terjadinya peningkatan penerimaan PPN terutang. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2017) dalam kurun waktu tahun 2012-2016, rata-rata tingkat Inflasi di Indonesia adalah sebesar 4,30 persen untuk tahun 2012, naik menjadi sebesar 8,36 persen di tahun 2013, dan tetap stabil di angka 8,36 persen di tahun 2014. Namun di tahun 2015 menurun menjadi sebesar 3,35 persen, dan menurun kembali sebesar 3,02 persen di tahun 2016. Tingkat inflasi tertinggi terjadi di tahun 2013 dan 2014 disebabkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan kebutuhan rumah tangga, sehingga menimbulkan *multiplier effect* terhadap harga barang lainnya. Namun kondisi ini perlahan mulai membaik terbukti dengan tingkat inflasi yang terus menurun hingga mencapai 3,02 persen pada tahun 2016. Menurut Badan Pusat Statistik (2017), faktor yang mendorong terjadinya penurunan inflasi yaitu dengan meningkatnya pasokan bahan pangan dan upaya pemerintah untuk meminimalisir dampak dari kenaikan harga BBM yang diikuti kenaikan tarif angkutan, tarif dasar listrik, dan beberapa komoditi yang memicu terjadinya inflasi.

Indikator ekonomi selanjutnya yang dapat mempengaruhi penerimaan PPN dan PPnBM adalah suku bunga. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2017) tingkat suku bunga di Indonesia di tahun 2012 berada pada level terendah sepanjang sejarah yaitu sebesar 4,8 persen, Namun di tahun 2013 terjadi peningkatan yang agresif menjadi sebesar 7,2 persen, meskipun tahun 2014 menurun menjadi sebesar 6,9 persen, tahun 2015 kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar 7,1 persen, dan di tahun 2016 kembali menurun drastis hingga sebesar 5,9 persen. Dengan demikian dapat disimpulkan tingkat suku bunga di Indonesia cenderung berfluktuasi seiring dengan penyesuaian kebijakan suku bunga bank ketika naik turunnya nilai inflasi.

Selain tingkat suku bunga, besar kecilnya kegiatan konsumsi masyarakat juga dipengaruhi oleh peningkatan jumlah penduduk. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2017), jumlah penduduk terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Di Tahun 2012 jumlah penduduk sebesar 248,037 juta jiwa, di tahun 2013 sebesar 251,268 juta jiwa, di tahun 2014 menjadi sebesar 254,454 juta jiwa, di tahun 2015 menjadi sebesar 257,563 juta jiwa, dan di tahun 2016 sebesar 258,704 juta jiwa.

Dari fenomena di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan pembahasan dan penelitian lebih lanjut mengenai "FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PPN DAN PPnBM".

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Jumlah PKP berpengaruh terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM?
2. Apakah PDB berpengaruh terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM?

3. Apakah Ekspor berpengaruh terhadap terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM?
4. Apakah Impor berpengaruh terhadap terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM?
5. Apakah Inflasi berpengaruh terhadap terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM?
6. Apakah Konsumsi berpengaruh terhadap terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM?
7. Apakah Suku Bunga berpengaruh terhadap terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM?
8. Apakah Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM?
9. Apakah Jumlah PKP, PDB, Ekspor, Impor, Inflasi, Konsumsi, Suku Bunga dan Jumlah Penduduk berpengaruh secara bersama-sama terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM ?

LANDASAN TEORI

1. Uraian Teori

1.1 Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Brotodiharjo dalam Sukardji 2014, hal. 1).

1.2 Pengertian PPN

PPN adalah pajak konsumsi barang dan jasa di daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi menurut Undang-Undang nomor 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas UU No. 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai dan jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah. Supramono dan Damayanti (2011, hal. 125) mengatakan pajak pertambahan nilai merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (daerah pabean), baik konsumsi barang kena pajak maupun jasa kena pajak.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tarif PPN yang berlaku adalah tarif tunggal 10% (sepuluh persen) untuk semua jenis penyerahan BKP dan JKP di dalam daerah pabean. Dan tarif ekspor 0% (nol persen) untuk ekspor BKP keluar daerah pabean. Atas tarif PPN tersebut, pemerintah dapat mengubahnya menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen). Perubahan tarif ini diatur dengan peraturan pemerintah.

1.3 Pengertian Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM)

Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) adalah pajak yang dipungut atas penyerahan barang kena pajak yang tergolong sebagai barang mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan barang kena pajak yang tergolong mewah tersebut didalam daerah Pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya, ataupun impor barang kena pajak yang tergolong mewah menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 2009, Adapun tarif PPnBM ditetapkan paling rendah sepuluh persen dan paling tinggi sebesar dua ratus persen. Dan apabila pengusaha melakukan ekspor barang kena pajak yang tergolong mewah maka akan dikenakan pajak dengan tarif sebesar nol persen.

1.4 Pengertian Jumlah PKP

Pengusaha Kena Pajak (PKP) merupakan Pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang pajak pertambahan nilai tahun 1984 dan perubahannya, tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (Siti Resmi 2014, hal. 25).

1.5 Pengertian PDB

Case dan Fair (2004) mendefinisikan PDB sebagai nilai pasar total semua barang dan jasa akhir yang diproduksi selama periode waktu tertentu oleh faktor-faktor produksi yang berlokasi di dalam sebuah Negara.

1.6 Ekspor

Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan dari Daerah Pabean. Keluar dari daerah pabean berarti keluar dari wilayah yuridiksi Indonesia menurut Undang-Undang Perdagangan Tahun 1996. Menurut

Priadi (2000), ekspor merupakan total barang dan jasa yang dijual oleh sebuah Negara ke negara lain, termasuk diantara barang-barang, asuransi, dan jasa-jasa pada suatu tahun tertentu.

1.7 Impor

Pengertian impor adalah kegiatan memasukan barang kedalam daerah pabean berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2006 tentang kepabeanan. Namun ketika impor sangat tinggi melebihi batas kuota yang ditentukan, bisa mematikan produk atau jasa sejenis dalam negeri. Dan yang paling mendasar dapat menguras pendapatan negara, dimana ketika impor tinggi, maka perolehan PPN dan PPnBM juga akan semakin tinggi atas pajak yang dikenakan terhadap impor.

1.8 Pengertian Inflasi

Inflasi adalah kecendrungan dari kenaikan harga-harga secara umum dan terus-menerus (Budiono 2000). Sedangkan Keynes menyatakan bahwa inflasi dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah dan investasi. Persentase tingkat inflasi dapat memberikan dampak baik atau buruk pada perekonomian suatu negara.

1.9 Pengertian Konsumsi

Mankiw (2006) mengartikan konsumsi sebagai pembelanjaan barang dan jasa oleh rumah tangga. Arti dari barang disini mencakup pembelanjaan rumah tangga untuk barang yang bertahan lama, seperti kendaraan dan perlengkapan perlengkapan rumah tangga, dan untuk barang yang tidak tahan lama.

1.10 Pengertian Suku Bunga

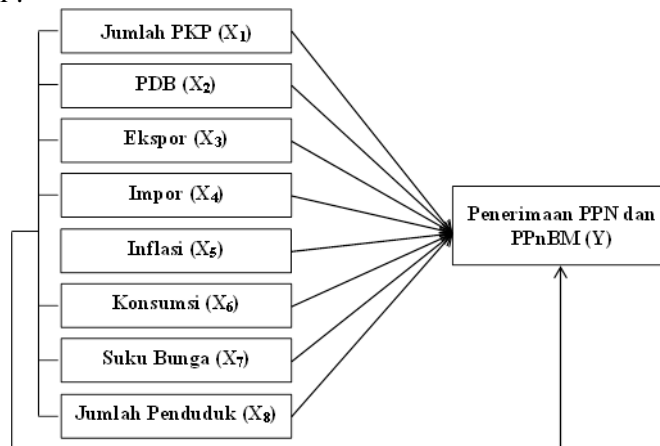
Pengertian suku bunga bank adalah balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya (Kasmir, 2002, hal. 121). Ada dua jenis bunga yang diberikan kepada nasabah, pertama bunga simpanan dan kedua adalah bunga pinjaman. Bunga simpanan adalah biaya dana yang harus dikelurkan kepada nasabah, sedangkan bunga pinjaman merupakan dana yang diterima dari nasabah. Baik bunga simpanan ataupun bunga pinjaman saling mempengaruhi satu sama lainnya.

1.11 Pengertian Penduduk

Pengertian penduduk menurut BPS (2015) adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis selama enam bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Pertumbuhan tingkat penduduk tinggi akan dapat menaikkan output tingkat dan ekspansi pasar baik pasar dalam negeri maupun luar negeri. Penambahan penduduk tinggi yang diiringi dengan perubahan teknologi akan mendorong tabungan dan juga penggunaan skala ekonomi di dalam produksi. Penambahan penduduk merupakan satu hal yang dibutuhkan dan bukan suatu masalah, melainkan sebagai unsur penting yang dapat memacu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Besarnya pendapatan dapat mempengaruhi penduduk, jika jumlah penduduk meningkat maka pendapatan yang dapat ditarik juga meningkat (Smith dalam Siskawati, 2014).

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam melihat pengaruh antara variabel dapat dilihat pada gambar paradigma berikut ini :



Gambar 2. Paradigma Penelitian
Sumber : Data Diolah

3. Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan PPN dan PPnBM adalah sebagai berikut :

- a. Jumlah PKP berpengaruh terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM.
- b. PDB berpengaruh terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM.
- c. Ekspor berpengaruh terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM.
- d. Impor berpengaruh terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM.
- e. Inflasi berpengaruh terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM.
- f. Konsumsi berpengaruh terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM.
- g. Suku Bunga berpengaruh terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM.
- h. Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM.
- i. Jumlah PKP, PDB, Ekspor, Impor, Inflasi, Konsumsi, Suku Bunga dan Jumlah Penduduk berpengaruh secara bersama-sama terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM.

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Indonesia.

2. Waktu Penelitian

Penelitian di lakukan pada bulan November 2017 sampai dengan Maret 2018.

C. Sumber Data

Sumber data penelitian ini berasal dari situs-situs resmi Pemerintah Republik Indonesia seperti: www.bps.go.id, www.kemenkeu.go.id, www.djp.go.id, dan www.bi.go.id.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi dokumentasi, dengan cara mengumpulkan, mencatat dan mengkaji data sekunder yang berupa data berkala (*time series*) dari tahun 1987-2016.

E. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier dengan metode kuadrat terkecil menggunakan bantuan software analisis data kuantitatif, Eviews 10.

1. Analisis Regresi Linier Berganda

Pada penelitian ini, analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji sejauh mana pengaruh Jumlah PKP, PDB, Ekspor, Konsumsi, Inflasi, Impor dan Jumlah Penduduk terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM. Persamaan regresi sebagai berikut dapat menggambarkan hubungan setiap variable tersebut.

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + \beta_7 X_7 + \beta_8 X_8 + \varepsilon$$

(Sugiyono, 2012, hal. 277)

Atau dalam bentuk transformasi *second difference*:

$$DY = Da + \beta_1 DX_1 + \beta_2 DX_2 + \beta_3 DX_3 + \beta_4 DX_4 + \beta_5 DX_5 + \beta_6 DX_6 + \beta_7 DX_7 + \beta_8 DX_8 + \varepsilon$$

Dimana:

- DY = PPN dan PPnBM (milyar rupiah)
- Da = Y bila $X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, X_6, X_7$, dan $X_8 = 0$
- β = Angka arah koefisien regresi
- DX_1 = Jumlah PKP (satuan/unit)
- DX_2 = PDB (milyar rupiah)
- DX_3 = Ekspor (milyar rupiah)
- DX_4 = Impor (milyar rupiah)
- DX_5 = Inflasi (%)
- DX_6 = Konsumsi (milyar rupiah)

- DX₇ = Suku Bunga (%)
 DX₈ = Jumlah Penduduk (satuan/unit)
 ε = *standard error*

Menurut Arif Daryanto dan Yundy Hafizrianda (2010, hal. 227), adanya perbedaan dalam satuan dan besaran variabel bebas maka persamaan regresi dengan data yang tidak normal setelah di log, harus dibuat dengan model *second difference*.

1. Uji Asumsi Klasik

Menurut Damodar (2003) terdapat tujuh asumsi klasik yang harus diambil dalam penggunaan model regresi ini, namun dalam ekonometrika hanya empat yang dianggap penting yaitu: uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heterokedastisitas dan uji autokorelasi.

2. Uji Hipotesis

a. Uji Secara Parsial (Uji - t)

Untuk menguji signifikansi hubungan, digunakan rumus uji statistik t. Kriteria pengambilan keputusan:

H₀: ditolak jika nilai F hitung > F tabel, atau bisa juga dengan:

H₀: ditolak jika nilai Probabilitas F < α (dengan α 5%)

b. Uji Simultan Signifikan (Uji - F)

Uji statistik F digunakan untuk melihat pengaruh variabel-variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen. Kriteria pengambilan keputusan yaitu dengan melihat nilai F hitung lebih besar daripada probabilitas α = 0,05, maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen (Ghozali, 2005, hal. 84).

3. Koefisien Determinasi (R-Square)

Pengujian dilakukan dengan melihat nilai R² yang dihasilkan dalam model regresi. Nilai R² antara 0 sampai 1 (0 < R² < 1). Jika nilai R² mempunyai interval bernilai besar (mendekati 1) berarti variabel bebas dapat memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. sedangkan jika R² bernilai kecil berarti kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas (Ghozali, 2005, hal. 83).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

1. Regresi Linier Berganda

Berikut ini adalah hasil estimasi regresi linier berganda yang diolah menggunakan program aplikasi *Eviews 10*:

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-34154.34	15496.33	-2.204028	0.0394
DX1	0.020747	0.325605	0.063718	0.9498
DX2	0.024914	0.009377	2.656797	0.0151
DX3	-0.057641	0.023040	-2.501810	0.0212
DX4	0.076703	0.018329	4.184880	0.0005
DX5	-51.46816	194.0837	-0.265185	0.7936
DX6	0.005833	0.038133	0.152977	0.8799
DX7	-363.6936	678.4617	-0.536056	0.5978
DX8	11689.13	5387.911	2.169511	0.0423
R-squared	0.776781	Mean dependent var		14097.33
Adjusted R-squared	0.687493	S.D. dependent var		19634.40
S.E. of regression	10976.08	Akaike info criterion		21.69395
Sum squared resid	2.41E+09	Schwarz criterion		22.11828
Log likelihood	-305.5623	Hannan-Quinn criter.		21.82685
F-statistic	8.699763	Durbin-Watson stat		1.610413
Prob(F-statistic)	0.000045			

Gambar 3. Hasil Estimasi Regresi Linier Berganda

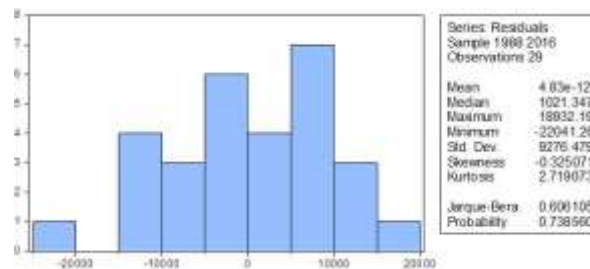
Analisis persamaan linier diatas dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- a. Konstanta sebesar -34154,34 dengan angka negatif menunjukkan bahwa apabila variabel independen dianggap nol maka PPN dan PPnBM akan mengalami penurunan sebesar 34154,34 milyar rupiah.
- b. Koefisien empiris variabel Jumlah PKP sebesar 0,020747 dengan angka positif menunjukkan bahwa apabila Jumlah PKP bertambah sebesar satu per tahun, maka akan menambah Penerimaan PPN dan PPnBM sebesar 0,020747 milyar rupiah.
- c. Koefisien empiris variabel PDB sebesar 0,024914 dengan angka positif menunjukkan bahwa apabila PDB bertambah sebesar satu milyar rupiah per tahun, maka akan menambah Penerimaan PPN dan PPnBM sebesar 0,024914 milyar rupiah.
- d. Koefisien empiris variabel Ekspor sebesar -0,057641 dengan angka negatif menunjukkan bahwa apabila Ekspor bertambah sebesar satu milyar rupiah per tahun, maka akan mengurangi Penerimaan PPN dan PPnBM sebesar 0,057641 milyar rupiah.
- e. Koefisien empiris variabel Impor sebesar 0,076703 dengan angka positif menunjukkan bahwa apabila Impor bertambah sebesar satu milyar rupiah per tahun, maka akan menambah Penerimaan PPN dan PPnBM sebesar 0,076703 milyar rupiah.
- f. Koefisien empiris variabel Inflasi sebesar -51,46816 dengan angka negatif menunjukkan bahwa apabila Inflasi bertambah sebesar satu persen per tahun, maka akan mengurangi Penerimaan PPN dan PPnBM sebesar 51,46816 milyar rupiah.
- g. Koefisien empiris variabel Konsumsi sebesar 0,005833 dengan angka positif menunjukkan bahwa apabila Konsumsi bertambah sebesar satu milyar rupiah per tahun, maka akan menambah Penerimaan PPN dan PPnBM sebesar 0,005833 milyar rupiah.
- h. Koefisien empiris variabel Suku Bunga sebesar -363,6936 dengan angka negatif menunjukkan bahwa apabila Suku Bunga bertambah sebesar satu persen per tahun, maka akan mengurangi Penerimaan PPN dan PPnBM sebesar 363,6936 milyar rupiah.
- i. Koefisien empiris variabel Jumlah Penduduk sebesar 11689,13 dengan angka positif menunjukkan bahwa apabila Jumlah Penduduk bertambah sebesar satu juta jiwa per tahun, maka akan menambah Penerimaan PPN dan PPnBM sebesar 11689,13 milyar rupiah.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Berikut ini adalah data hasil uji normalitas yang diolah menggunakan program aplikasi *Eviews 7*:



Gambar 4. Uji Normalitas

Berdasarkan gambar diatas, hasil uji normalitas residual menunjukkan nilai Probabilitas sebesar $0,738560 > (\alpha) 0,05$ ini berarti residual berdistribusi normal, sehingga memenehi kriteria asumsi normalitas.

b. Uji Multikolinearitas

Berikut ini adalah gambar hasil uji Variance Inflation Factors (VIF):

Variance Inflation Factors
 Date: 04/01/18 Time: 11:28
 Sample: 1987 2016
 Included observations: 29

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	2.40E+08	57.80446	NA
DX1	0.106018	22.97085	3.869436
DX2	8.79E-05	6.982022	3.185265
DX3	0.000531	5.071017	4.649988
DX4	0.000336	4.658723	4.411746
DX5	37668.49	1.548927	1.548505
DX6	0.001454	17.13810	6.554355
DX7	460310.3	1.345730	1.333840
DX8	29029589	64.13616	1.279966

Gambar 5. Uji Multikolinearitas

Hasil pengolahan data dengan program *Eviews 7* menunjukkan bahwa:

- 1) Centered VIF variabel X1 yaitu Jumlah PKP, lebih kecil dari 10 ($3.869436 < 10$), maka variabel Jumlah PKP tidak mempunyai gejala multikolinearitas.
- 2) Centered VIF variabel X2 yaitu PDB, lebih kecil dari 10 ($3.185265 < 10$), maka variabel Jumlah PDB tidak mempunyai gejala multikolinearitas.
- 3) Centered VIF variabel X3 yaitu Ekspor, lebih kecil dari 10 ($4.649988 < 10$), maka variabel Ekspor tidak mempunyai gejala multikolinearitas.
- 4) Centered VIF variabel X4 yaitu Impor, lebih kecil dari 10 ($4.411746 < 10$), maka variabel Impor tidak mempunyai gejala multikolinearitas.
- 5) Centered VIF variabel X5 yaitu Inflasi, lebih kecil dari 10 ($1.548505 < 10$), maka variabel Inflasi tidak mempunyai gejala multikolinearitas.
- 6) Centered VIF variabel X6 yaitu Konsumsi, lebih kecil dari 10 ($6.554355 < 10$), maka variabel Konsumsi tidak mempunyai gejala multikolinearitas.
- 7) Centered VIF variabel X7 yaitu Suku Bunga, lebih kecil dari 10 ($1.333840 < 10$), maka variabel Suku Bunga tidak mempunyai gejala multikolinearitas.
- 8) Centered VIF variabel X8 yaitu Jumlah Penduduk, lebih kecil dari 10 ($1.279966 < 10$), maka variabel Jumlah Penduduk tidak mempunyai gejala multikolinearitas.

c. Uji Heterokedastisitas

Berikut adalah gambar hasil uji heterokedastisitas :

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

F-statistic	0.945152	Prob. F(8,20)	0.5031
Obs*R-squared	7.955938	Prob. Chi-Square(8)	0.4378
Scaled explained SS	3.252531	Prob. Chi-Square(8)	0.9175

Gambar 6. Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan gambar IV.4, p value yang ditunjukkan dengan nilai Prob. Chi-square(8) pada obs*R-squared yaitu sebesar 0,4378. Oleh karena p value $0,4378 > 0,05$ maka tidak mempunyai persoalan heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Berikut adalah gambar hasil uji autokorelasi:

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	0.666919	Prob. F(2,18)	0.5255
Obs*R-squared	2.000706	Prob. Chi-Square(2)	0.3677

Gambar 7. Uji Autokorelasi

Nilai Prob Chi Square(2) yang merupakan nilai p value uji Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test, yaitu sebesar $0,3677 > 0,05$ sehingga H_0 diterima atau ini berarti tidak ada masalah autokorelasi.

e. **Uji Hipotesis**1). **Uji Secara Parsial (Uji - t)**

Hasil Estimasi Regresi Linear Berganda dari hasil pengolahan menggunakan program Eviews 7, diperoleh derajat nilai probability seperti terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Hasil Uji Parsial (Uji-t)

Variabel	t-Statistic	Prob.	Analisis
DX1	0.063718	0,9498	Tidak berpengaruh
DX2	2.656797	0,0151	Berpengaruh Signifikan
DX3	-2.501810	0,0212	Berpengaruh Signifikan
DX4	4.184880	0,0005	Berpengaruh Signifikan
DX5	-0.265185	0,7936	Tidak Berpengaruh Signifikan
DX6	0.152977	0,8799	Tidak Berpengaruh Signifikan
DX7	-0.536056	0,5978	Tidak Berpengaruh Signifikan
DX8	2.169511	0,0423	Berpengaruh Signifikan

Sumber: Pengolahan Eviews

Berdasarkan tabel IV.10 dapat diketahui hasil uji hipotesis secara parsial adalah sebagai berikut:

a) **Pengaruh Jumlah PKP (DX1) terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM**

Nilai probability untuk variabel Jumlah PKP adalah 0,9498 pada tingkat kepercayaan (α) 5%, hal ini menunjukkan bahwa nilai probability sebesar 0,9498 > dari 0,05. Artinya H_0 diterima dan H_A ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara pasial Jumlah PKP tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM di Indonesia.

b) **Pengaruh PDB (DX2) terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM**

Nilai probability untuk variabel PDB adalah 0,0151 pada tingkat kepercayaan (α) 5%, hal ini menunjukkan bahwa nilai probability 0,0151 lebih kecil dari 0,05. Artinya H_0 ditolak dan H_A diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara pasial PDB berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM di Indonesia.

c) **Pengaruh Ekspor (DX3) terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM**

Nilai probability untuk variabel Ekspor adalah 0,0212 pada tingkat kepercayaan (α) 5%, hal ini menunjukkan bahwa nilai probability 0,0212 lebih kecil dari 0,05. Artinya H_0 ditolak dan H_A diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara pasial PDB berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM di Indonesia.

d) **Pengaruh Impor (DX4) terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM**

Nilai probability untuk variabel Impor adalah 0,0005 pada tingkat kepercayaan (α) 5%, hal ini menunjukkan bahwa nilai probability 0,0005 lebih kecil dari 0,05. Artinya H_0 ditolak dan H_A diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara pasial Impor berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM di Indonesia.

e) **Pengaruh Inflasi (DX5) terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM**

Nilai probability untuk variabel Inflasi adalah 0,7936 pada tingkat kepercayaan (α) 5%, hal ini menunjukkan bahwa nilai probability 0,7936 lebih besar dari 0,05. Artinya H_0 diterima dan H_A ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara pasial Inflasi berpengaruh tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM di Indonesia.

f) **Pengaruh Konsumsi (DX6) terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM**

Nilai probability untuk variabel Konsumsi adalah 0,8799 pada tingkat kepercayaan (α) 5%, hal ini menunjukkan bahwa nilai probability 0,8799 lebih besar dari 0,05. Artinya H_0 diterima dan H_A ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara pasial Konsumsi tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM di Indonesia.

g) **Pengaruh Suku Bunga (DX7) terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM**

Nilai probability untuk variabel Suku Bunga adalah 0,5978 pada tingkat kepercayaan (α) 5%, hal ini menunjukkan bahwa nilai probability 0,5978 lebih besar dari 0,05. Artinya H_0 diterima dan H_A ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara pasial Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM di Indonesia

h) Pengaruh Jumlah Penduduk (DX8) terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM

Nilai probability untuk variabel Jumlah Penduduk adalah 0,0423 pada tingkat kepercayaan (α) 5%, hal ini menunjukkan bahwa nilai probability 0,0423 lebih kecil dari 0,05. Artinya H_0 ditolak dan H_A diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara pasial Jumlah Penduduk berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM di Indonesia.

2). Uji Simultan Signifikan (Uji - F)

Nilai probability F yang dicari dari hasil pengolahan menggunakan program *Eviews7* dapat dilihat pada tabel IV.11 berikut:

Tabel 1. Hasil Uji Simultan (Uji-F)

F-statistic	8,699763
Prob. (F-statistic)	0,000045

Sumber: Pengolahan Eviews

Berdasarkan analisis tersebut, nilai Prob. F sebesar $0,000045 < \text{tingkat kepercayaan } (\alpha) 0,05$. Dengan demikian maka H_0 ditolak dan H_A diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Jumlah PKP, PDB, Ekspor, Impor, Inflasi, Konsumsi, Suku Bunga dan Jumlah Penduduk secara bersama-sama atau secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM (Y) di Indonesia.

f. Koefisien Determinansi

Uji model estimasi dapat dilihat dari Koefisien Determinasi (R^2). Koefisien determinasi ini berfungsi untuk mengetahui persentase besarnya pengaruh variabel independen dan variabel dependen yaitu dengan mengkuadratkan koefisien yang ditemukan. Pengujian dilakukan dengan melihat nilai R^2 yang dihasilkan dalam model regresi. Nilai R^2 antara 0 sampai 1 ($0 < R^2 < 1$). Jika nilai R^2 mempunyai interval bernilai besar (mendekati 1) berarti variabel bebas dapat memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. sedangkan jika R^2 bernilai kecil berarti kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas.

Untuk koefisien determinasi pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kontribusi atau persentase pengaruh Jumlah PKP, PDB, Ekspor, Impor, Inflasi, Konsumsi, Suku Bunga terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM. Nilai koefisien determinasi dapat diukur oleh nilai R-squared atau Adjusted R-Squared. R-Squared digunakan pada saat variabel bebas hanya 1 saja (biasa disebut dengan Regresi Linier Sederhana), sedangkan Adjusted R-Squared digunakan pada saat variabel bebas lebih dari satu.

Koefisien Determinasi yang dicari dari hasil pengolahan menggunakan program *Eviews7* dapat dilihat pada tabel IV.12 berikut:

Tabel 2. Koefisien Determinasi R^2 (R-square)

R-Squared	0.776781
Adjusted R-Squared	0.687493

Sumber: Pengolahan Eviews

Berdasarkan hasil estimasi regresi linier berganda yang dapat dilihat pada tabel IV.12, diketahui nilai koefisien determinasi R^2 (R Adjusted R-Square) sebesar 0,687493 atau 68,75%. Angka ini mengidentifikasi bahwa Penerimaan PPN dan PPnBM mampu dijelaskan oleh Jumlah PKP, PDB, Ekspor, Impor, Inflasi, Konsumsi, Suku Bunga, dan Jumlah Penduduk sebesar 68,75%. Sedangkan sisanya 31,25% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

B. Pembahasan

Berikut ini adalah tabel hasil estimasi regresi linear yang telah diuji menggunakan asumsi klasik, uji hipotesis dan koefisien determinasi:

Tabel 3. Hasil Estimasi Koefisien Regresi Linier Berganda

Keterangan	Coefficient	t-Statistic	Prob.
Variabel Jumlah PKP (X1)	0,020747	0,063718	0,9498
PDB (X2)	0,024914	2,656797	0,0151

Ekspor (X3)	-0,057641	-2,501810	0,0212
Impor (X4)	0,076703	4,184880	0,0005
Inflasi (X5)	-51,46816	-0,265185	0,7936
Konsumsi (X6)	0,005833	0,152977	0,8799
Suku Bunga (X7)	-363,6936	-0,536056	0,5978
Jumlah Penduduk (X8)	11689,13	2,169511	0,0423
R-squared = 0,776781			
Adjust R-squared = 0,687493			
F-statistic = 8,699744			
Prob (F-statistic) = 0,000045			

Sumber: Pengolahan Eviews

Berdasarkan tabel hasil estimasi koefisien regresi linier berganda tersebut, maka analisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pengaruh Jumlah PKP terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM

Berdasarkan tabel IV.13 dapat diketahui bahwa koefisien empiris variabel Jumlah PKP mempunyai nilai probability sebesar 0,9498, artinya nilai probability untuk variabel jumlah PKP sebesar $0,9498 > (\alpha) 0,05$ dibawah batas tingkat signifikansi 0,05, ini berarti bahwa secara parsial Jumlah PKP tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM di Indonesia. Dengan begitu hipotesis ditolak.

Jumlah pengusaha kena pajak tidak berpengaruh secara signifikan dikarenakan oleh pemakaian jasa konsultan perpajakan, sehingga pajak yang dibayarkan dibuat seminimal mungkin, maka jumlah pengusaha kena pajak tercatat tidak berpengaruh secara signifikan pada penerimaan pajak pertambahan nilai. Lalu disebabkan juga dengan adanya pengusaha kena pajak yang tidak taat pajak ataupun menunggak dalam membayar pajak, ini juga menyebabkan jumlah pengusaha kena pajak tercatat tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Adapula pengusaha kena pajak yang kurang memahami konsep pajak, ketika penghasilannya yang seharusnya sudah dikenakan pajak, pengusaha itu sengaja tidak mendaftarkan diri sebagai pengusaha kena pajak, karena takut labanya berkurang, hal ini juga menyebabkan jumlah pengusaha kena pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai meskipun data jumlah PKP menunjukkan pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 2,43%.

Penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan Tugino (2012) yang hasilnya jumlah pengusaha kena pajak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.

Berdasarkan dari hasil penelitian diatas, maka penulis dapat menyimpulkan Jumlah PKP tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM di Indonesia.

b. Pengaruh PDB terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM

Berdasarkan tabel IV.13 dapat diketahui bahwa koefisien empiris variabel PDB sebesar 0,024914 dan nilai probability untuk variabel PDB sebesar 0,0151, artinya dengan angka koefisien positif menunjukkan bahwa apabila PDB bertambah satu milyar rupiah per tahun, maka akan menambah Penerimaan PPN dan PPnBM sebesar 0,024914 milyar rupiah. Sementara itu nilai probability untuk variabel PDB sebesar $0,0151 < 0,05$, ini berarti bahwa secara parsial PDB berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM di Indonesia. Dengan begitu hipotesis diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Saepudin (2008), Tugino (2012), dan Velaj dan Prendi (2014) yang menyimpulkan bahwa PDB berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN.

Berdasarkan dari hasil penelitian diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa PDB berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM di Indonesia.

c. Pengaruh Ekspor terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM

Berdasarkan tabel IV.13 dapat diketahui bahwa koefisien empiris variabel Ekspor sebesar -0,057641 dan nilai probability untuk variabel Ekspor sebesar 0,0212, artinya dengan angka koefisien negatif menunjukkan bahwa apabila Ekspor bertambah satu milyar rupiah per tahun, maka akan mengurangi Penerimaan PPN dan PPnBM sebesar 0,057641 milyar rupiah. Sementara itu nilai probability untuk variabel Ekspor sebesar $0,0212 < 0,05$, ini berarti bahwa secara parsial Ekspor berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM di Indonesia. Dengan begitu hipotesis diterima.

Hasil Penelitian ini sesuai dengan penelitian Tugino (2012) yang menyimpulkan bahwa ekspor berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN di Indonesia dan pengaruhnya tidak signifikan.

Berdasarkan Undang-undang mengenai tarif ekspor dan hasil penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa Ekspor berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM di Indonesia.

d. Pengaruh Impor terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM

Berdasarkan tabel IV.13 dapat diketahui bahwa koefisien empiris variabel Impor sebesar 0,076703 dan nilai probability untuk variabel Impor sebesar 0,0005, artinya dengan angka koefisien positif menunjukkan bahwa apabila Impor bertambah satu milyar rupiah per tahun, maka akan menambah Penerimaan PPN dan PPnBM sebesar 0,076703 milyar rupiah. Sementara itu nilai probability untuk variabel Impor sebesar $0,0005 < 0,05$, ini berarti bahwa secara pasial Impor berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM di Indonesia. Dengan begitu hipotesis diterima.

Pada penelitian penulis diketahui laju pertumbuhan impor rata-rata naik sebesar 10,86%, meskipun pada tahun 2013-2016 laju pertumbuhan impor menurun. Namun saat Impor bergerak baik karena bahan baku atau barang modal, maka ekonomi bergerak, berarti produksi naik, sehingga berpengaruh terhadap penerimaan PPN dan PPnBM, sebaliknya saat impor turun di tahun 2013-2016 berpengaruh pada menurunnya realisasi pertumbuhan penerimaan PPN dan PPnBM.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Basas (2005) yang menyimpulkan bahwa Impor berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN.

Berdasarkan dari hasil penelitian diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Impor berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM di Indonesia.

e. Pengaruh Inflasi Penerimaan PPN dan PPnBM

Berdasarkan tabel IV.13 dapat diketahui bahwa koefisien empiris variabel Inflasi sebesar -51,46816 dan nilai probability untuk variabel Inflasi sebesar 0,7936, artinya dengan angka koefisien negatif menunjukkan bahwa apabila Inflasi bertambah satu persen per tahun, maka akan mengurangi Penerimaan PPN dan PPnBM sebesar 51,46816 milyar rupiah. Sementara itu nilai probability untuk variabel Inflasi sebesar $0,7936 > 0,05$, ini berarti bahwa secara pasial Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM di Indonesia. Dengan begitu hipotesis ditolak.

Terjadinya inflasi kemungkinan akan menyebabkan kuantitas barang yang dibeli berkurang karena harga barang meningkat, maka penerimaan PPN dan PPnBM akan tetap sama tidak terjadi kenaikan. Konsumen akan mengurangi pengeluaran untuk konsumsi maka penerimaan PPN dan PPnBMpun tidak maksimal.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Muibi (2013), yang menyimpulkan bahwa Inflasi tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Tugino (2012), yang menyimpulkan bahwa inflasi berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN.

Berdasarkan dari hasil penelitian diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM di Indonesia.

f. Pengaruh Konsumsi terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM

Berdasarkan tabel IV.13 dapat diketahui bahwa koefisien empiris variabel Konsumsi sebesar 0,005833 dan nilai probability untuk variabel Konsumsi adalah 0,8800, artinya dengan angka koefisien positif menunjukkan bahwa apabila Konsumsi bertambah sebesar satu milyar per tahun, maka akan menambah Penerimaan PPN dan PPnBM sebesar 0,005833 milyar rupiah. Sementara itu nilai probability untuk variabel Konsumsi sebesar $0,8800 > 0,05$, ini berarti bahwa secara pasial Konsumsi tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM di Indonesia. Dengan begitu hipotesis ditolak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Tugino (2012), yang menyimpulkan bahwa konsumsi tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN.

Berdasarkan dari hasil penelitian diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Konsumsi tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM di Indonesia.

g. Pengaruh Suku Bunga terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM

Berdasarkan tabel IV.13 dapat diketahui bahwa koefisien empiris variabel Suku Bunga sebesar -363,6884 dan nilai probability untuk variabel Suku Bunga sebesar 0,5978, artinya dengan angka koefisien negatif menunjukkan bahwa apabila Suku Bunga bertambah satu persen per tahun, maka akan mengurangi Penerimaan PPN dan PPnBM sebesar 363,6884 milyar rupiah. Sementara itu nilai probability untuk variabel Suku Bunga sebesar $0,5978 > 0,05$, ini berarti bahwa secara pasial Suku Bunga tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM di Indonesia.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Tugino (2012), yang menyimpulkan bahwa Suku Bunga tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN.

Berdasarkan dari hasil penelitian diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa ada kesesuaian antara hasil penelitian, teori dengan pendapat dan penelitian terdahulu, yakni Suku Bunga berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM di Indonesia.

h. Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM

Berdasarkan tabel IV.13 dapat diketahui bahwa koefisien empiris variabel Jumlah Penduduk sebesar 0,011689 dan nilai probability untuk variabel Jumlah Penduduk sebesar 0,0423, artinya dengan angka koefisien positif menunjukkan bahwa apabila Jumlah Penduduk bertambah sebesar satu jiwa per tahun, maka akan menambah Penerimaan PPN dan PPnBM sebesar 0,011689 milyar rupiah. Sementara itu nilai probability untuk variabel Jumlah Penduduk sebesar $0,0423 < 0,05$, ini berarti bahwa secara pasial Jumlah Penduduk berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM di Indonesia.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Sabrina Nurlita (2008) yang menyimpulkan bahwa Jumlah Penduduk berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN.

Berdasarkan dari hasil penelitian diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa ada kesesuaian antara hasil penelitian, teori dengan pendapat dan penelitian terdahulu, yakni Jumlah Penduduk berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM di Indonesia.

i. Pengaruh Jumlah PKP, PDB, Ekspor, Impor, Inflasi, Konsumsi, Suku Bunga dan Jumlah Penduduk secara bersama-sama terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM

Berdasarkan tabel IV.13 dapat diketahui bahwa nilai koefisien konstanta (C) adalah -34154.22, nilai koefisien Prob. F sebesar 0,000045 dan nilai koefisien Adjust R-squared sebesar 0,687493.

Nilai Koefisien Adjust R-squared sebesar 0,687493 menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel independen Jumlah PKP (X1), PDB (X2), Ekspor (X3), Impor (X4), Inflasi (X5), Konsumsi (X6), Suku Bunga (X7), Jumlah Penduduk (X8) mampu memberikan variasi terhadap variabel Penerimaan PPN dan PPnBM (Y) sebesar 68,75%. Sedangkan sisanya 31,25% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tugino (2012), yang menyimpulkan bahwa Jumlah PKP, PDB, Ekspor, Inflasi, Suku Bunga SBI, Pengeluaran Konsumsi berpengaruh terhadap Penerimaan PPN. Kemudian berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Velaj dan Prendi (2014), yang menyimpulkan bahwa PDB, tingkat inflasi, tingkat pengangguran dan impor berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Dan hasil penelitian yang dilakukan oleh Renata, dkk (2016), menunjukkan bahwa inflasi, nilai tukar rupiah dan jumlah PKP berpengaruh terhadap penerimaan PPN.

Berdasarkan dari hasil penelitian diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa ada kesesuaian antara hasil penelitian, teori dengan pendapat dan penelitian terdahulu, yakni Jumlah PKP, PDB, Ekspor, Impor, Inflasi, Konsumsi, Suku Bunga dan Jumlah Penduduk berpengaruh secara simultan terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM di Indonesia.

KESIMPULAN

Berikut ini kesimpulan dari penelitian tentang Faktor-Faktor yang mempengaruhi penerimaan PPN dan PPnBM pada tahun 1987 sampai dengan tahun 2016 dengan jumlah pengamatan sebanyak 30:

1. Jumlah PKP tidak berpengaruh signifikan terhadap PPN dan PPnBM.

2. PDB berpengaruh signifikan terhadap PPN dan PPnBM.
3. Ekspor berpengaruh signifikan terhadap PPN dan PPnBM.
4. Impor berpengaruh signifikan terhadap PPN dan PPnBM.
5. Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap PPN dan PPnBM.
6. Konsumsi tidak berpengaruh signifikan terhadap PPN dan PPnBM.
7. Suku bunga tidak berpengaruh signifikan terhadap PPN dan PPnBM.
8. Jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap PPN dan PPnBM.
9. Jumlah PKP, PDB, ekspor, impor, inflasi, konsumsi, suku bunga dan jumlah penduduk secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap PPN dan PPnBM.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Basas, S. (2005). *Pengaruh PDB Sektor Industri dan Nilai Impor terhadap Penerimaan Pajak Tidak Langsung di Indonesia Tahun 1984-2002*. Surabaya: Tesis Pascasarjana Universitas Airlangga.
- [2] Muibi, S.O and Olantunbosun O.S. (2013). Macroeconomic Determinants of Tax Revenue in Nigeria . *World Applied Sciences Journal*, 28 (I): 27-35.
- [3] Renata, A. H., Hidayat, K., & Kaniskha, B. (2016). *Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah Dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi pada Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I)*. Malang: Jurnal Perpajakan (JEJAK)| Vol. 9 No. 1 .
- [4] Sabrina Nurlita. (2008). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia 1985/1986-2005*. Surabaya: Tesis Pascasarjana Airlangga.
- [5] Saepudin. (2008). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Sumatera Utara*. Medan: Tesis Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
- [6] Sinungan, M. (2000). *Manajemen Dana Bank*. Edisi Kedua. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- [7] Sukirno, S. (2012). *Mikro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- [8] Tugino. (2012). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia, TESIS*. Medan: Universitas Sumatea Utara.
- [9] Velaj, E., & Prendi, L. (2014). Tax Revenue – The Determinant Factors-The Case of Albania. *European Scientific Journal*, Vol. 1, September.